ABSTRAK

Deskripsi Tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau Menjadi Taman Nasional, Bethsiani Silvana Helena Fobia, 21310151. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peralihan fungsi hutan lindung dan cagar alam menjadi taman nasional, sehingga menimbulkan perdebatan dimasyarakat sekitar. Pokok permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu: 1) Apa alasan perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional?, 2) Bagaimana dampak perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional? dan 3) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional?. Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu : 1) Untuk mengetahui alasan perubhan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional, 2) Untuk mengetahui dampak perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional dan 3) Untuk mengetahui reaksi masyarakat setelah perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Jenis penelitian adalah penelitian Empiris. Variable bebas dalam penelitian ini adalah alasan perubahan fungsi hutan lindung dan cagar mutis timau menjadi taman nasional dan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah mengukur seberapa besar dampak dan reaksi masyarakat setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Surat Keputusan Menteri LHK RI NO. 946 Tahun 2024, UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, UU No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang perancanaan Kehutanan, Perubahan Bentuk Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, data sekunder dan juga data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Populasi yang menjadi tempat penelitian penulis yakni kelompok masyarakat di Desa Fatumnasi, Desa Nenas, Desa Taneotob dan Desa Noebesi dan Desa Bonleu. Teknik sampel yang digunakan adalah "*Purposive Sampling*", Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis berada di Desa Fatumnasi, Desa Nenas di Kec. Fatumnasi, selanjutnya Desa Taneotob dan Desa Noebesi, di Kec. Nunbena dan Desa Bonleu di Kec. Tobu yang berbatasan dengan Taman Nasional Mutis Timau di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Responden yang diambil penulis berjumblah 60 responden, diambil dari kepala BKSDA wilayah Soe, UPTD KPH, Desa Fatumnasi, Desa Nenas, Desa Taneotob dan Desa Noebesi, Desa Bonleu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan yakni: 1) Untuk melegalkan aktivitas masyarakat, 2) Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kawasan dengan diberlakukannya system zonasi, 3)Untuk memaksimalkan konservasi dan pembangunan infastruktur dalam Kawasan, 4)Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 5) Memudahkan pemerintah dalam system pengawasan, 6) Masyarakat bisa lebih memahami kebutuhan hutan dengan melalui pendampingan oleh pemerintah, 7) Rekasi kelompok masyarakat yang setuju (Pro), dimana dari 5 desa hasil penelitian penulis menemukan 2 (dua) desa yang setuju dan 8) Reaksi masyarakat yang tidak setuju (kontra, dari 5 desa penelitian penulis menemukan ada 3 (tiga) desa yang tidak setuju. Saran dari penulis, yaitu diharapkan pemerintah yang berkaitan dalam perubahan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke desa-desa yang mengelilingi hutan lindung dan cagar alam, agar masyarakat didesa-desa tersebut bisa memahami mengenai dampak dari taman nasional ini.

Kata kunci: Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, Mutis Timau

ABSTRACT

Description of the Change in Function of the Mutis Timau Protected Forest and Nature Reserve into a National Park, Bethsiani Silvana Helena Fobia, 21310151. This research is motivated by the change in function of the protected forest and nature reserve into a national park, which has sparked debate among the surrounding community. The main issues studied by the author are: 1) What are the reasons for the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park? 2) What are the impacts of the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park? and 3) What is the community's reaction to the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park? This study aims to: 1) To determine the reasons for the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park, 2) To determine the impact of the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park and 3) To determine the community's reaction after the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park. The nature of this research is descriptive, and the type of research used is Empirical research. The independent variable in this study is the reason for the change in function of the Mutis Timau protected forest and nature reserve into a national park, and the dependent variable in this study is measuring the extent of the impact and community reaction after the change in function of the Mutis Timau Protected Forest and Nature Reserve into a National Park. The data sources used in this study are primary data, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Decree of the Minister of LHK RI NO. 946 of 2024, Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, Government Regulation 23 of 2021 concerning forestry implementation, Law No. 32 of 2024 concerning amendments to law number 5 of 1990 concerning conservation of living natural resources and their ecosystems, Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 concerning Forestry Planning, Changes in Forest Area Forms and Changes in Forest Area Functions, secondary data and also tertiary data. The data collection techniques used in this study are interview techniques and documentation techniques. The population used as the author's research site is the community groups in Fatumnasi Village, Nenas Village, Taneotob Village, Noebesi Village and Bonleu Village. The sampling technique used is "Purposive Sampling". The locations that became the author's research sites were in Fatumnasi Village, Nenas Village in Fatumnasi District, then Taneotob Village and Noebesi Village in Nunbena District and Bonleu Village in Tobu District which borders the Mutis Timau National Park in the South Central Timor Regency area. The respondents taken by the author amounted to 60 respondents, taken from the head of the Soe regional BKSDA, UPTD KPH, 5 villages (Fatumnasi, Nenas, Bonleu, Taneotob and Noebesi). The technique used in this study is qualitative analysis technique. The findings indicate that the policy aims to: 1) To legalize community activities, 2) To improve regional management and supervision with the enactment of a zoning system, 3) To maximize conservation and infrastructure development within the area, 4) To improve the community's economy, 5) To make it easier for the government in the supervision system, 6) The community can better understand the needs of the forest through assistance by the government, 7) Reactions of community groups who agree (Pro), where from 5 villages the results of the author's research found 2 (two) villages that agreed and 8) Reactions of the community who did not agree (contra), from 5 research villages the author found that there were 3 (three) villages that did not agree. The author suggests that the government conduct thorough socialization in surrounding villages to ensure residents fully understand the impact of the National Park status.

Keywords: National Park, Nature Reserve, Protection Forest, Mutis Timau